



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/4679/KSP.00/70-73/07/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Pedoman *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Tahun 2026

27 Juli 2026

**Yth. Kepala Daerah/Plt. Kepala Daerah
(Daftar Terlampir)**

di

Tempat

Dalam pelaksanaan tugas koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b serta Pasal 8 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang menetapkan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi (TPK).

Sehubungan dengan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan TPK, bersama ini kami sampaikan dengan hormat **Pedoman Pelaporan *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Risk Based Surveillance System Tahun 2026** yang dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/PedomanMCSP2026>.

Kami mengimbau kepada Kepala Daerah agar:

1. Menyusun tim pencegahan korupsi daerah yang berfokus pada pemenuhan 7 fokus area pencegahan korupsi daerah tahun 2026, yaitu: (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Layanan Publik; (4) Manajemen ASN; (5) Pengelolaan BMD; (6) Optimalisasi Pendapatan Daerah; dan (7) Penguatan APIP;
2. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memastikan seluruh aksi pencegahan korupsi, sebagaimana 7 fokus area MCSP, berjalan dengan optimal;
3. Dalam pelaksanaan APBD 2026 agar menghindari dan mencegah praktik TPK yang terkait dengan kerugian keuangan negara/daerah, penyuapan, gratifikasi yang dianggap suap, pemerasan, konflik kepentingan, dan bentuk TPK lainnya;

4. Sehubungan dengan penyusunan APBD 2027 agar Pemerintah Daerah memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketepatan waktu, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan TPK; dan
5. Bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan upaya pencegahan korupsi termasuk dalam hal diseminasi atas program pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Pemangku kepentingan dimaksud dimulai dari unsur eksekutif, legislatif, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pemangku kepentingan terkait lainnya termasuk masyarakat umum.

Apabila terdapat permasalahan atau kendala dalam rangka pelaksanaan pencegahan korupsi pemerintah daerah agar disampaikan melalui informasi.korsup@kpk.go.id atau dapat menghubungi penanggung jawab (PIC) pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah terkait.

Untuk koordinasi lebih lanjut terkait dengan program koordinasi pemberantasan korupsi daerah, pemerintah daerah dapat menghubungi PIC Wilayah masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Ely Kusumastuti

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
8. Ketua DPRD Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia; dan
9. Plt. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lampiran 1

Nomor : B/4679/KSP.00/70-73/07/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

Daftar Kepala Daerah/ Plt. Kepala Daerah:**PROVINSI ACEH**

1. Pemerintah Aceh
2. Kabupaten Simeulue
3. Kabupaten Aceh Tamiang
4. Kabupaten Aceh Singkil
5. Kabupaten Aceh Selatan
6. Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Kota Lhokseumawe
8. Kabupaten Nagan Raya
9. Kabupaten Bener Meriah
10. Kabupaten Aceh Utara
11. Kabupaten Aceh Jaya
12. Kabupaten Aceh Barat
13. Kota Subulussalam
14. Kota Langsa
15. Kabupaten Gayo Lues
16. Kabupaten Aceh Timur
17. Kabupaten Aceh Tenggara
18. Kabupaten Aceh Tengah
19. Kota Sabang
20. Kota Banda Aceh
21. Kabupaten Pidie Jaya
22. Kabupaten Pidie
23. Kabupaten Bireuen
24. Kabupaten Aceh Besar

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2. Kabupaten Asahan
3. Kabupaten Batu Bara
4. Kabupaten Dairi
5. Kabupaten Deli Serdang
6. Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Kabupaten Karo
8. Kabupaten Labuhanbatu
9. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
10. Kabupaten Labuhanbatu Utara
11. Kabupaten Langkat
12. Kabupaten Mandailing Natal
13. Kabupaten Nias
14. Kabupaten Nias Barat
15. Kabupaten Nias Selatan
16. Kabupaten Nias Utara
17. Kabupaten Padang Lawas
18. Kabupaten Padang Lawas Utara
19. Kabupaten Pakpak Bharat
20. Kabupaten Samosir
21. Kabupaten Serdang Bedagai
22. Kabupaten Simalungun
23. Kabupaten Tapanuli Selatan
24. Kabupaten Tapanuli Tengah
25. Kabupaten Tapanuli Utara
26. Kabupaten Toba
27. Kota Binjai

	28. Kota Gunungsitoli
	29. Kota Medan
	30. Kota Padang Sidempuan
	31. Kota Pematangsiantar
	32. Kota Sibolga
	33. Kota Tanjungbalai
	34. Kota Tebing Tinggi
PROVINSI SUMATERA BARAT	1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2. Kabupaten Kepulauan Mentawai 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kabupaten Padang Pariaman 5. Kota Payakumbuh 6. Kabupaten Solok Selatan 7. Kabupaten Agam 8. Kabupaten Tanah Datar 9. Kabupaten Pesisir Selatan 10. Kabupaten Solok 11. Kota Padang 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Pariaman 14. Kota Padang Panjang 15. Kabupaten Pasaman 16. Pasaman Barat 17. Kota Solok 18. Kota Sawahlunto 19. Kabupaten Sijunjung 20. Kabupaten Dharmasraya
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Kabupaten Bangka 3. Kabupaten Belitung 4. Kabupaten Bangka Selatan 5. Kabupaten Bangka Tengah 6. Kabupaten Bangka Barat 7. Kabupaten Belitung Timur 8. Kota Pangkal Pinang
PROVINSI RIAU	1. Pemerintah Provinsi Riau 2. Kabupaten Bengkalis 3. Kabupaten Indragiri Hilir 4. Kabupaten Indragiri Hulu 5. Kabupaten Kampar 6. Kabupaten Kepulauan Meranti 7. Kabupaten Kuantan Singingi 8. Kabupaten Pelalawan 9. Kabupaten Rokan Hilir 10. Kabupaten Rokan Hulu 11. Kabupaten Siak 12. Kota Dumai 13. Kota Pekanbaru
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2. Kota Tanjung Pinang 3. Kota Batam 4. Kabupaten Bintan 5. Kabupaten Karimun 6. Kabupaten Kepulauan Anambas 7. Kabupaten Natuna 8. Kabupaten Lingga
PROVINSI LAMPUNG	1. Pemerintah Provinsi Lampung

	- Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Lampung Tengah - Kabupaten Lampung Utara - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Tulang Bawang - Kabupaten Tanggamus - Kabupaten Lampung Timur - Kabupaten Way Kanan - Kabupaten Pesawaran - Kabupaten Pringsewu - Kabupaten Mesuji - Kabupaten Tulang Bawang Barat - Kabupaten Pesisir Barat - Kota Bandar Lampung - Kota Metro
PROVINSI BENGKULU	- Pemerintah Provinsi Bengkulu - Kabupaten Rejang Lebong - Kota Bengkulu - Kabupaten Kepahiang - Kabupaten Bengkulu Tengah - Kabupaten Bengkulu Utara - Kabupaten Seluma - Kabupaten Bengkulu Selatan - Kabupaten Kaur - Kabupaten Lebong - Kabupaten Muko Muko
PROVINSI JAMBI	- Pemerintah Provinsi Jambi - Kabupaten Kerinci - Kabupaten Merangin - Kabupaten Sarolangun - Kabupaten Batanghari - Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Kabupaten Bungo - Kabupaten Tebo - Kota Jambi - Kota Sungai Penuh
PROVINSI SUMATERA SELATAN	- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan - Kabupaten Ogan Komering Ulu - Kabupaten Ogan Komering Ilir - Kabupaten Muara Enim - Kabupaten Lahat - Kabupaten Musi Rawas - Kabupaten Musi Banyuasin - Kabupaten Banyuasin - Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur - Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan - Kabupaten Ogan Ilir - Kabupaten Empat Lawang - Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir - Kabupaten Musi Rawas Utara - Kota Palembang - Kota Pagar Alam - Kota Lubuk Linggau - Kota Prabumulih
PROVINSI DKI JAKARTA	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta

PROVINSI BANTEN

1. Pemerintah Provinsi Banten
2. Kota Serang
3. Kota Cilegon
4. Kota Tangerang
5. Kota Tangerang Selatan
6. Kabupaten Tangerang
7. Kabupaten Serang
8. Kabupaten Pandeglang
9. Kabupaten Lebak

PROVINSI JAWA BARAT

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2. Kota Bandung
3. Kota Banjar
4. Kota Bekasi
5. Kota Bogor
6. Kota Cimahi
7. Kota Cirebon
8. Kota Depok
9. Kota Sukabumi
10. Kota Tasikmalaya
11. Kabupaten Bandung
12. Kabupaten Bandung Barat
13. Kabupaten Bekasi
14. Kabupaten Bogor
15. Kabupaten Ciamis
16. Kabupaten Cianjur
17. Kabupaten Cirebon
18. Kabupaten Garut
19. Kabupaten Indramayu
20. Kabupaten Karawang
21. Kabupaten Kuningan
22. Kabupaten Majalengka
23. Kabupaten Pangandaran
24. Kabupaten Purwakarta
25. Kabupaten Subang
26. Kabupaten Sukabumi
27. Kabupaten Sumedang
28. Kabupaten Tasikmalaya

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kabupaten Kulon Progo
3. Kabupaten Bantul
4. Kabupaten Gunung Kidul
5. Kabupaten Sleman
6. Kota Yogyakarta

PROVINSI JAWA TENGAH

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Kabupaten Banjarnegara
3. Kabupaten Banyumas
4. Kabupaten Batang
5. Kabupaten Blora
6. Kabupaten Boyolali
7. Kabupaten Brebes
8. Kabupaten Cilacap
9. Kabupaten Demak
10. Kabupaten Grobogan
11. Kabupaten Jepara
12. Kabupaten Karanganyar
13. Kabupaten Kebumen
14. Kabupaten Kendal
15. Kabupaten Klaten
16. Kabupaten Kudus

17. Kabupaten Magelang
18. Kabupaten Pati
19. Kabupaten Pekalongan
20. Kabupaten Pemalang
21. Kabupaten Purbalingga
22. Kabupaten Purworejo
23. Kabupaten Rembang
24. Kabupaten Semarang
25. Kabupaten Sragen
26. Kabupaten Sukoharjo
27. Kabupaten Tegal
28. Kabupaten Temanggung
29. Kabupaten Wonogiri
30. Kabupaten Wonosobo
31. Kota Magelang
32. Kota Pekalongan
33. Kota Salatiga
34. Kota Semarang
35. Kota Surakarta
36. Kota Tegal

PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Kabupaten Bangkalan
3. Kabupaten Banyuwangi
4. Kabupaten Blitar
5. Kabupaten Bojonegoro
6. Kabupaten Bondowoso
7. Kabupaten Gresik
8. Kabupaten Jember
9. Kabupaten Jombang
10. Kabupaten Kediri
11. Kabupaten Lamongan
12. Kabupaten Lumajang
13. Kabupaten Madiun
14. Kabupaten Magetan
15. Kabupaten Malang
16. Kabupaten Mojokerto
17. Kabupaten Nganjuk
18. Kabupaten Ngawi
19. Kabupaten Pacitan
20. Kabupaten Pamekasan
21. Kabupaten Pasuruan
22. Kabupaten Ponorogo
23. Kabupaten Probolinggo
24. Kabupaten Sampang
25. Kabupaten Sidoarjo
26. Kabupaten Situbondo
27. Kabupaten Sumenep
28. Kabupaten Trenggalek
29. Kabupaten Tuban
30. Kabupaten Tulungagung
31. Kota Batu
32. Kota Blitar
33. Kota Kediri
34. Kota Madiun
35. Kota Malang
36. Kota Mojokerto
37. Kota Pasuruan
38. Kota Probolinggo
39. Kota Surabaya

PROVINSI BALI

1. Pemerintah Provinsi Bali

2. Kota Denpasar
3. Kabupaten Badung
4. Kabupaten Jembrana
5. Kabupaten Buleleng
6. Kabupaten Klungkung
7. Kabupaten Karangasem
8. Kabupaten Tabanan
9. Kabupaten Gianyar
10. Kabupaten Bangli

PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Kota Kupang
3. Kabupaten Alor
4. Kabupaten Belu
5. Kabupaten Ende
6. Kabupaten Flores Timur
7. Kabupaten Kupang
8. Kabupaten Lembata
9. Kabupaten Malaka
10. Kabupaten Manggarai
11. Kabupaten Manggarai Barat
12. Kabupaten Manggarai Timur
13. Kabupaten Nagekeo
14. Kabupaten Ngada
15. Kabupaten Rote Ndao
16. Kabupaten Sabu Raijua
17. Kabupaten Sikka
18. Kabupaten Sumba Barat
19. Kabupaten Sumba Barat Daya
20. Kabupaten Sumba Tengah
21. Kabupaten Sumba Timur
22. Kabupaten Timor Tengah Selatan
23. Kabupaten Timor Tengah Utara

PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Kabupaten Lombok Timur
3. Kota Bima
4. Kabupaten Dompu
5. Kota Mataram
6. Kabupaten Lombok Utara
7. Kabupaten Lombok Tengah
8. Kabupaten Lombok Barat
9. Kabupaten Bima
10. Kabupaten Sumbawa
11. Kabupaten Sumbawa Barat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
2. Kota Singkawang
3. Kabupaten Kubu Raya
4. Kabupaten Kapuas Hulu
5. Kabupaten Sekadau
6. Kabupaten Bengkayang
7. Kabupaten Landak
8. Kabupaten Kayong Utara
9. Kabupaten Mempawah
10. Kabupaten Sintang
11. Kabupaten Ketapang
12. Kabupaten Sambas
13. Kabupaten Sanggau
14. Kabupaten Melawi
15. Kota Pontianak

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2. Kota Palangkaraya 3. Kabupaten Barito Selatan 4. Kabupaten Barito Timur 5. Kabupaten Barito Utara 6. Kabupaten Gunung Mas 7. Kabupaten Kapuas 8. Kabupaten Katingan 9. Kabupaten Kotawaringin Barat 10. Kabupaten Kotawaringin Timur 11. Kabupaten Lamandau 12. Kabupaten Murung Raya 13. Kabupaten Pulang Pisau 14. Kabupaten Sukamara 15. Kabupaten Seruyan
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2. Kabupaten Berau 3. Kabupaten Kutai Barat 4. Kabupaten Kutai Kartanegara 5. Kabupaten Kutai Timur 6. Kabupaten Paser 7. Kabupaten Penajam Paser Utara 8. Kabupaten Mahakam Ulu 9. Kota Samarinda 10. Kota Balikpapan 11. Kota Bontang
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2. Kota Banjarbaru 3. Kota Banjarmasin 4. Kabupaten Balangan 5. Kabupaten Banjar 6. Kabupaten Barito Kuala 7. Kabupaten Hulu Sungai Utara 8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 9. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10. Kabupaten Kotabaru 11. Kabupaten Tabalong 12. Kabupaten Tanah Bumbu 13. Kabupaten Tanah Laut 14. Kabupaten Tapin
PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2. Kabupaten Bulungan 3. Kabupaten Malinau 4. Kabupaten Nunukan 5. Kabupaten Tana Tidung 6. Kota Tarakan
PROVINSI SULAWESI SELATAN	1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Kabupaten Bantaeng 3. Kabupaten Barru 4. Kabupaten Bone 5. Kabupaten Bulukumba 6. Kabupaten Enrekang 7. Kabupaten Gowa 8. Kabupaten Jeneponto 9. Kabupaten Kepulauan Selayar 10. Kabupaten Luwu 11. Kabupaten Luwu Timur 12. Kabupaten Luwu Utara

13. Kabupaten Maros
14. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
15. Kabupaten Pinrang
16. Kabupaten Sidenreng Rappang
17. Kabupaten Sinjai
18. Kabupaten Soppeng
19. Kabupaten Takalar
20. Kabupaten Tana Toraja
21. Kabupaten Toraja Utara
22. Kabupaten Wajo
23. Kota Makassar
24. Kota Palopo
25. Kota Pare Pare

PROVINSI SULAWESI BARAT

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
2. Kabupaten Pasang Kayu
3. Kabupaten Mamuju
4. Kabupaten Mamasa
5. Kabupaten Polewali Mandar
6. Kabupaten Majene
7. Kabupaten Mamuju Tengah

PROVINSI GORONTALO

1. Pemerintah Provinsi Gorontalo
2. Kabupaten Boalemo
3. Kabupaten Bone Bolango
4. Kabupaten Gorontalo
5. Kabupaten Gorontalo Utara
6. Kabupaten Pahuwato
7. Kota Gorontalo

PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kota Palu
3. Kabupaten Tojo Una Una
4. Kabupaten Sigi
5. Kabupaten Donggala
6. Kabupaten Banggai
7. Kabupaten Morowali
8. Kabupaten Morowali Utara
9. Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Kabupaten Banggai Laut
11. Kabupaten Buol
12. Kabupaten Parigi Moutong
13. Kabupaten Poso
14. Kabupaten Toli Toli

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Kabupaten Kolaka
3. Kabupaten Konawe
4. Kabupaten Muna
5. Kabupaten Buton
6. Kabupaten Konawe Selatan
7. Kabupaten Bombana
8. Kabupaten Wakatobi
9. Kabupaten Kolaka Utara
10. Kabupaten Konawe Utara
11. Kabupaten Buton Utara
12. Kabupaten Kolaka Timur
13. Kabupaten Konawe Kepulauan
14. Kabupaten Muna Barat
15. Kabupaten Buton Tengah
16. Kabupaten Buton Selatan
17. Kota Kendari

	18. Kota Bau Bau
PROVINSI SULAWESI UTARA	1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2. Kabupaten Bolaang Mongondow 3. Kabupaten Minahasa 4. Kabupaten Kepulauan Sangihe 5. Kabupaten Kepulauan Talaud 6. Kabupaten Minahasa Selatan 7. Kabupaten Minahasa Utara 8. Kabupaten Minahasa Tenggara 9. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 10. Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro 11. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 12. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 13. Kota Manado 14. Kota Bitung 15. Kota Tomohon 16. Kota Kotamobagu
PROVINSI MALUKU UTARA	1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2. Kabupaten Halmahera Barat 3. Kabupaten Halmahera Tengah 4. Kabupaten Halmahera Timur 5. Kabupaten Halmahera Selatan 6. Kabupaten Halmahera Utara 7. Kabupaten Kepulauan Sula 8. Kabupaten Pulau Morotai 9. Kabupaten Pulau Taliabu 10. Kota Ternate 11. Kota Tidore Kepulauan
PROVINSI MALUKU	1. Pemerintah Provinsi Maluku 2. Kabupaten Maluku Tengah 3. Kabupaten Maluku Tenggara 4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 5. Kabupaten Buru 6. Kabupaten Seram Bagian Timur 7. Kabupaten Seram Bagian Barat 8. Kabupaten Kepulauan Aru 9. Kabupaten Maluku Barat Daya 10. Kabupaten Buru Selatan 11. Kota Ambon 12. Kota Tual
PROVINSI PAPUA	1. Pemerintah Provinsi Papua 2. Kota Jayapura 3. Kabupaten Jayapura 4. Kabupaten Keerom 5. Kabupaten Sarmi 6. Kabupaten Mamberamo Raya 7. Kabupaten Biak Numfor 8. Kabupaten Kepulauan Yapen 9. Kabupaten Supiori 10. Kabupaten Waropen
PROVINSI PAPUA BARAT	1. Pemerintah Provinsi Papua Barat 2. Kabupaten Manokwari 3. Kabupaten Fak Fak 4. Kabupaten Kaimana 5. Kabupaten Manokwari Selatan 6. Kabupaten Pegunungan Arfak 7. Kabupaten Teluk Bintuni

	8. Kabupaten Teluk Wondama
PROVINSI PAPUA SELATAN	1. Pemerintah Provinsi Papua Selatan 2. Kabupaten Merauke 3. Kabupaten Boven Digoel 4. Kabupaten Mappi 5. Kabupaten Asmat
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	1. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan 2. Kabupaten Jayawijaya 3. Kabupaten Pegunungan Bintang 4. Kabupaten Mamberamo Tengah 5. Kabupaten Lanny Jaya 6. Kabupaten Yahukimo 7. Kabupaten Tolikara 8. Kabupaten Yalimo 9. Kabupaten Nduga
PROVINSI PAPUA TENGAH	1. Pemerintah Provinsi Papua Tengah 2. Kabupaten Nabire 3. Kabupaten Paniai 4. Kabupaten Mimika 5. Kabupaten Puncak 6. Kabupaten Puncak Jaya 7. Kabupaten Deiyai 8. Kabupaten Dogiyai 9. Kabupaten Intan Jaya
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	1. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 2. Kota Sorong 3. Kabupaten Sorong 4. Kabupaten Sorong Selatan 5. Kabupaten Raja Ampat 6. Kabupaten Tambrauw 7. Kabupaten Maybrat

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Ely Kusumastuti